

BAB II

MUNDURNYA INDIA DARI NEGOSIASI RCEP, STRATEGI EKONOMI POLITIK INDIA ERA KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI, HINGGA POLITISASI *SWADESHI*

Pada bagian ini, akan dipaparkan gambaran umum dari praktik *Swadeshi* dengan melihat sejarah kebangkitannya dan adaptasinya di era pasca reformasi ekonomi tahun 1991. Penulis juga menggambarkan ekonomi politik India di bawah pemerintahan Modi baik ekonomi politik internasional, maupun ekonomi domestik. Selain itu, penulis juga akan memaparkan studi kasus utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai posisi India selama tergabung di dalam RCEP dari awal terbentuknya RCEP hingga mundurnya India dari negosiasi RCEP.

2.1. India dalam Negosiasi RCEP

Bergabungnya India ke dalam forum RCEP menciptakan peluang-peluang baru untuk memperdalam reformasi politik dan ekonomi domestiknya. Dengan mudarnya keuntungan reformasi dari liberalisasi ekonomi di tahun 1990-an, pemerintahan Modi harus menyesuaikan kembali struktur industri melalui babak baru reformasi politik dan ekonomi, untuk mengatasi masalah ekonomi struktural seperti defisit fiskal yang tinggi dan tingkat inflasi yang tinggi (Fangfei, 2020).

2.1.1. India di awal terbentuknya RCEP

Sama seperti negara mitra ASEAN lainnya, ketergabungan India ke RCEP berawal dari *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA). India dan ASEAN sudah melakukan kerja sama perdagangan sejak 2003 yang ditandai dengan

penandatanganan *The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* sebagai dasar hukum untuk membuat perjanjian perdagangan lain di kemudian hari. Pada 1 Januari 2010, India dan ASEAN menandatangani *The ASEAN-India Trade in Goods Agreement* yang menandakan kedua belah pihak sepakat untuk membuka pasar masing-masing dengan mengurangi dan menghapus tarif bea masuk atas 76,4% dari keseluruhan barang. Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya *The ASEAN-Indian Trade in Services Agreement* pada November 2014 yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai transparansi, peraturan domestik, pengakuan, akses pasar, perlakuan nasional, dan penyelesaian sengketa. Penandatanganan *The ASEAN-India Investment Agreement* juga dilakukan di bulan yang sama dengan tujuan menetapkan perlindungan investasi untuk melakukan perlakuan yang adil dan merata bagi para investor, perlakuan non-diskriminatif atau nasionalisasi, serta kompensasi yang adil (ASEAN, 2015). Melalui AIFTA, India telah mendapatkan benefit dalam ketiga pilar perdagangan internasional, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.

Berdasarkan data dari *World Bank* (2015), PDB India dapat melebihi USD 2 juta per tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa India merupakan salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar kedua setelah Tiongkok di Asia Pasifik dan RCEP. Pada tahun 2003 hingga 2007, pertumbuhan ekonomi India meningkat sekitar 8,8 persen. Ekonomi India pun bertumbuh 6,1 persen lebih cepat dari tahun 2008-2009 di antara negara-negara Asia lainnya. Jika India bergabung ke RCEP, maka sumbangsih kontribusi India dalam blok tersebut akan sangat besar (Menta, 2017). Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang melesat, India butuh memperluas

pasarnya sebagai jalur pendistribusian hasil produksinya. Bergabungnya India dengan RCEP akan semakin menguntungkan karena akan membuka pasar domestiknya ke 30 persen penduduk dunia. Mengingat besarnya keunggulan komparatif⁵ India jika dibandingkan dengan negara anggota RCEP lainnya, terutama pada sektor jasa dengan sumber daya manusia yang mumpuni (Iqbaludin, 2021).

Presiden Joko Widodo (2017) dalam KTT ke-15 ASEAN-India pun menyatakan bahwa beliau melihat potensi yang sangat besar atas kerja sama ASEAN-India yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Dengan total kuantitas potensi pasar bersama yang mencapai 2 miliar individu dan total akumulasi GDP yang mencapai USD 4,5 miliar, ASEAN-India berpotensi menjadi salah satu generator ekonomi internasional. Joko Widodo juga menegaskan bahwa optimalisasi kerja sama perdagangan ASEAN-India merupakan prioritas bersama. Salah satu langkah optimalisasi kerja sama tersebut adalah melalui keberhasilan RCEP yang diharapkan dapat mengintegrasikan dan memberikan benefit dari segi ekonomi bagi kepentingan bersama (Machmudin, 2017).

Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keanggotaan India ketika RCEP baru terbentuk. Singh yang merupakan salah satu pelopor reformasi ekonomi India 1991 cenderung bersikap terbuka atas integrasi ekonomi global (Indian National Congress, 2009). Sebagai

⁵ Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada negara lainnya (Hayes, 2024).

manifestasi pewarisan kebijakan “*Look East*”⁶, India dapat dikatakan cukup ambisius pada saat RCEP baru terbentuk dikarenakan target India yang ingin berada di dalam satu FTA dengan negara-negara Asia Timur demi kepentingan geopolitiknya. Sebagaimana surat yang ditulis pada April 2006 oleh perdana Menteri Manmohan Singh kepada Presiden Kongres Sonia Gandhi yang menyatakan keprihatinannya atas dampak negatif AFTA terhadap pekerja perkebunan. Dalam suratnya, Singh menyatakan “*Our approach to regional trade agreements in general, and FTAs in particular, has been evolved after careful consideration of our geo-political as well as economic interest*” (K. Singh, 2016).

Memasuki era pemerintahan Narendra Modi di 2014, kebijakan “*Look East*” berubah menjadi kebijakan “*Act East*” yang lebih proaktif. Kebijakan “*Act East*” merupakan hasil peningkatan dari kebijakan “*Look East*” yang mana tidak hanya memperkuat kerja sama dengan ASEAN dan Asia Timur, tetapi juga menjadi tanda bahwa India akan aktif berintegrasi di dalam kawasan Asia Pasifik sebagai kekuatan besar dan membangun tatanan kawasan (Fathullah, 2017). India terpaksa untuk mengandalkan RCEP sebagai alternatif dari WTO dan TPP milik AS karena dianggap dapat mengatasi dampak dari krisis ekonomi dan meningkatkan ekonomi domestik, serta memiliki mekanisme kerja sama yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan TPP. Selain itu, India menganggap RCEP akan memberikan keuntungan ekonomi potensial jangka panjang yang signifikan. Fokus pertumbuhan ekonomi pun terus bergeser ke wilayah Asia-Pasifik. Oleh karena itu, India

⁶ Kebijakan “*Look East*” yang terbentuk sejak masa pemerintahan Narasimha Rao (1991-1996) merupakan kebijakan India yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur (Fathullah, 2017).

menganggap RCEP sebagai gerbang dari perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru. RCEP juga diharapkan dapat membantu India dalam memaksimalkan keunggulannya dalam sektor jasa⁷, walaupun sektor manufaktur India lebih lemah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur (Fangfei, 2020).

Bergabungnya India ke dalam negosiasi RCEP disebabkan oleh India yang memiliki riwayat kerja sama perdagangan dengan ASEAN sejak 2003 melalui AIFTA. Pada awal terbentuknya RCEP, baik Manmohan Singh, maupun Narendra Modi menanggapinya dengan ambisius, serta memiliki harapan yang cukup besar untuk meningkatkan pengaruh perdagangan India di Asia Pasifik. India berharap RCEP dapat memaksimalkan keunggulan India pada perdagangan sektor jasa di perdagangan global.

2.1.2. *Dinamika India selama bernegosiasi di RCEP*

Berdasarkan *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*, dalam rentang waktu sejak awal 2013 hingga akhir 2015, perundingan RCEP akan diselenggarakan sebanyak sepuluh putaran dengan membahas beberapa agenda (Menta, 2017). Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo (2014) dalam KTT ASEAN ke-24 menyatakan bahwa empat putaran pertama perundingan RCEP tidak sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan beberapa dari enam negara mitra ASEAN belum memiliki *bilateral FTA* antara satu dengan yang lain (Sari, 2014). Misalnya, India

⁷ India memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di sektor jasa dan menjadi kontributor utama dari seluruh ekspor India, yaitu sebesar 40 persen.

dengan Tiongkok belum memiliki *bilateral FTA* yang menyebabkan sulit tercapainya kesepakatan pada negosiasi tentang penghapusan hambatan perdagangan (Menta, 2017).

Berkaitan dengan India yang belum memiliki *bilateral FTA* dengan beberapa negara mitra ASEAN, India mengusulkan “*three-tier approach*” dengan mengurangi tarif untuk beberapa negara anggota RCEP yang sudah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan dengan India. Diketahui India pada saat itu telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan ASEAN, Korea Selatan, dan Jepang (K. Singh, 2016). Tabel 2.1 berikut menyajikan rincian usulan “*three-tier approach*” yang ditawarkan India.

Tabel 2.1 Rincian Usulan “*Three-tier Approach*” dari India

<i>Tier</i>	Negara Target	Penurunan Tarif (%)	Keterangan
<i>Tier I</i>	Seluruh negara anggota ASEAN	80	15% akan diberlakukan pada periode 10 tahun, dan 65% sisanya akan mulai berlaku setelah perjanjian RCEP diberlakukan
<i>Tier II</i>	Korea Selatan dan Jepang	65	
<i>Tier III</i>	Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru	42,5	Ketiga negara masing-masing menawarkan penurunan sebesar: 42,5%; 80%; dan 65%.

Sumber: olah data dari K. Singh (2016)

Motivasi India menawarkan “*three-tier approach*” tersebut adalah memberikan Tiongkok perlakuan yang berbeda supaya tidak memiliki kesempatan yang besar untuk memasuki pasar India. Akibatnya, usulan “*three-tier approach*” ini tidak direspons dengan baik oleh sebagian besar negara anggota RCEP, terutama Tiongkok. Akibatnya, negosiasi RCEP tidak berjalan lancar dan India dianggap sebagai mitra dagang yang sulit bernegosiasi (Palit, 2016). Atas sikapnya, India pun

dicap sebagai negara yang proteksionis atas industri domestiknya. Seharusnya negosiasi tersebut ditutup pada akhir tahun 2015, tetapi malah melewati tenggat waktu akibat negosiasi yang berlarut. Akhirnya, negara anggota RCEP lainnya memberikan ultimatum kepada India agar segera menurunkan tarif atau meninggalkan RCEP (Priya, 2016).

Putaran ketiga belas yang dilaksanakan di Auckland menjadi putaran yang berisi perdebatan terhebat. Berangkat dari usulan “*three-tier approach*”, diketahui Tiongkok mendorong negara anggota ASEAN lainnya untuk menentang usulan tersebut yang menyebabkan keretakan di antara negara-negara ASEAN. Penentangan pun disuarakan oleh Laos dan Kamboja, yang kemudian diikuti oleh Malaysia dan Indonesia. Sementara Filipina dan Singapura bersikap netral karena melihat RCEP menjadi ‘ring tinju’ bagi India dan Tiongkok untuk mempertahankan posisinya di dalam blok tersebut (Chakraborty, 2016).

Pada putaran keempat belas yang merupakan putaran terakhir, India memberikan keringanan dengan mengusulkan penghapusan tarif barang sebanyak 80 persen untuk seluruh negara mitra RCEP, terkecuali Tiongkok. Untuk sementara, India merevisi penurunan tarif Tiongkok menjadi sebesar 65 persen, yang sebelumnya hanya sebesar 42,5 persen. Periode penghapusan tarif untuk Tiongkok akan dilakukan bertahap hingga 20-30 tahun lamanya agar memastikan industri lokal India sudah berkapabilitas untuk bersaing dengan produk asing. Di balik tawaran tersebut, India juga mengharapkan timbal balik berupa jaminan dalam keberjalanan negosiasi tentang perdagangan sektor jasa dan investasi. India mengharapkan kesepakatan pada ketiga pilar negosiasi—barang, jasa, dan

investasi—dilaksanakan dalam satu paket, bukan terpisah dengan perbedaan dominasi prioritas. Hal ini dikarenakan RCEP hanya memprioritaskan negosiasi perdagangan barang (Pattanayak, 2016).

Sebagai imbal balik, Australia dan Selandia Baru masing-masing 80 persen dan 65 persen, sementara Tiongkok hanya siap menurunkan tarif menjadi 42,5 persen. Apabila diterapkan, maka India akan paling menguntungkan Tiongkok. Bahkan tanpa adanya FTA, India pun telah mengalami defisit perdagangan barang yang sangat besar, yaitu hampir USD 53 miliar dengan Tiongkok pada tahun 2015-16. Dengan total defisit perdagangan barang India dengan negara anggota RCEP sebesar USD 93 miliar, maka Tiongkok menjadi penyumbang terbesar dari keseluruhan total defisit perdagangan barang (Pattanayak, 2016). Berikut Tabel 2.2 menyajikan proses negosiasi tarif “*three-tier approach*” oleh negara-negara golongan *tier III*.

Tabel 2.2 Proyeksi Proses Negosiasi Tarif “*Three-tier Approach*” oleh Negara-negara Golongan *Tier III* (dalam %)

Negara <i>Tier III</i>	Penawaran awal India	Negosiasi oleh negara mitra	Revisi tarif sementara	Tawaran imbal balik
Tiongkok	42.5	42.5	65	42.5
Australia	42.5	80	80	80
Selandia Baru	42.5	65	80	65

Sumber: olah data dari berbagai sumber, 2024

Keringanan usulan *three-tier approach* yang ditawarkan oleh India bertujuan untuk mempercepat proses negosiasi. Melihat *progress* kemajuan tersebut, akhirnya tenggat waktu yang ditetapkan pada 2016 pun terlewati (Pattanayak, 2016). Walaupun sudah berusaha mengurungkan usulan *three-tier approach*-nya, India tetap berharap jika penurunan tarif dapat dibatasi. Namun, harapan India tersebut tidak mungkin terwujud karena berpotensi menjadikan

RCEP sebagai blok perjanjian perdagangan yang tidak mendatangkan benefit (Palit, 2016).

RCEP pun diketahui kurang menguntungkan bagi kegiatan perdagangan jasa dan investasi. Peraturan perdagangan jasa di ASEAN yang tidak homogen menjadi salah satu faktor sulitnya menerapkan peraturan perdagangan jasa di RCEP. Hal ini menimbulkan frustrasi bagi negara yang berminat memperdagangkan sektor jasa seperti India, Australia, Jepang, dan Selandia Baru (Palit, 2016). India mengharapkan liberalisasi yang lebih besar dalam sektor jasa yang memfasilitasi perpindahan tenaga profesional dari satu negara ke negara lain atau perdagangan jasa Mode 4,⁸ mengingat India memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang IT. Selain mendorong liberalisasi visa, India juga mendukung liberalisasi yang lebih besar dalam sektor jasa Mode 3 dan Mode 2. Namun, preferensi negara-negara anggota RCEP lainnya lebih condong ke arah perdagangan barang daripada perdagangan jasa (Priya, 2016).

Putaran negosiasi RCEP pun terus berlanjut, tetapi India tetap mempertahankan kepentingannya hingga putaran ke-28 pada September 2019. Pada putaran tersebut India secara intensif mengangkat isu perdagangan digital dan lokalisasi data (Marjani, 2019). Perdagangan digital juga terlibat dalam isu-isu sensitif seperti aliran data lintas batas, pengumpulan data, penyimpanan, privasi, dan keamanan siber. Kendala utama yang mengganggu India adalah isu *e-commerce* yang mengadopsi model TPP milik Amerika Serikat. Negara-negara

⁸ Klasifikasi perdagangan sektor jasa menurut GATS terbagi ke dalam empat mode: 1) Mode 1 (*cross border supply*); 2) Mode 2 (*consumption abroad*); 3) Mode 3 (*commercial presence*); dan Mode 4 (*presence of natural person*) (Hanifah et al., 2021).

maju seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok sangat mendukung rancangan kebijakan ini karena akan menguntungkan perusahaan multinasional (MNC) (Agarawal, 2019). Hal ini karena MNC akan memperoleh ‘kekebalan’ dari yurisdiksi domestik. Dikhawatirkan industri domestik India yang belum stabil akan sulit menyainginya. Dalam isu ini pun India memiliki kepentingan yang bertentangan dengan Tiongkok. Proyek *Digital Silk Road*⁹ milik Tiongkok akan menyasar India sehingga dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi industri domestik (Kelsey, 2022).

RCEP juga turut mengatur isu lokalisasi data¹⁰ melalui kelompok kerja khusus *Working Group on E-commerce* (WGEC) (Karina, 2019). Pada *Term of Reference* (ToR) WGEC, diketahui terdapat pelarangan lokalisasi data yang kontroversial bagi India. Regulasi tersebut sangat mengencangkan transfer informasi lintas batas demi mengekspansi bisnis ke ranah global. Data yang ada pun harus disimpan di *server* luar negeri. Pembatasan aliran data hanya diperbolehkan untuk melindungi privasi konsumen, bukan sebagai proteksionisme sebagaimana yang diajukan India (Agarawal, 2019). Pada saat itu, India sedang merancang Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2018 yang apabila disahkan akan memberikan mandat untuk lokalisasi data bagi *e-commerce* dan penyedia layanan digital (Institute of South Asian Studies & Center for Digital Society, 2021). Proposal yang mewajibkan aliran bebas data dan *source code* pun selalu ditolak

⁹ Program Tiongkok yang bertujuan untuk memperluas teknologi digitalnya di negara-negara berkembang dengan harga yang lebih terjangkau (Williams, 2024).

¹⁰ Lokalisasi data mengharuskan penyimpanan awal data dilakukan di dalam *server* negara. Data hanya boleh ditransfer ke *server* asing jika telah memenuhi undang-undang privasi atau perlindungan data setempat (Hiscock, 2022).

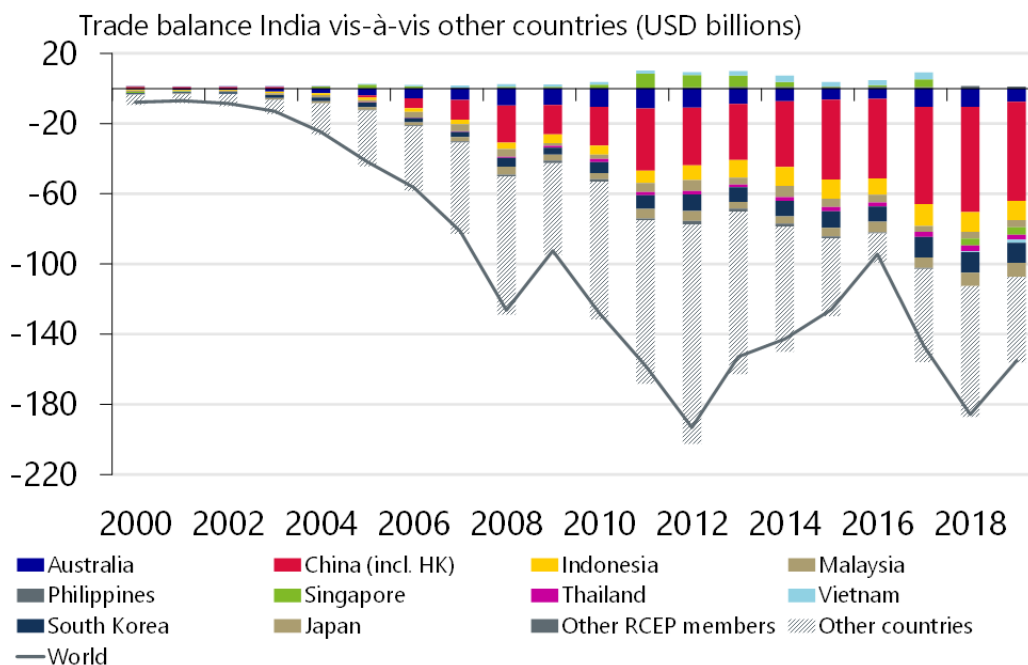
oleh India. Akibatnya, pembahasan mengenai *e-commerce* dalam perundingan RCEP pada saat itu menjadi perdebatan besar dan tak kunjung menemukan jalan tengah. Dikarenakan perdebatan tersebut yang tak kunjung usai, India memutuskan untuk mundur dari RCEP pada 2019 (Choudhury, 2019).

Proses negosiasi dalam forum tersebut berlangsung sangat rumit dalam mencapai kesepakatan. Beberapa proposal yang diajukan oleh India seringkali ditentang oleh negara-negara anggota lainnya. Proposal tersebut menyangkut kepentingan yang krusial bagi keberlangsungan ekonomi politik India. Kepentingan negara-negara mitra ASEAN lainnya yang merupakan negara maju sangat bertentangan dengan kepentingan India yang mengarah ke nasionalisme.

2.1.3. Mundurnya India dari negosiasi RCEP

Kekuatan ekonomi India memang masih dinilai kurang mumpuni, baik dari neraca perdagangan, maupun kondisi struktur perekonomiannya. Sehingga India memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan RCEP pada 4 November 2019 dalam KTT RCEP ke-3 di Bangkok. Secara resmi, alasan dari pemerintah India adalah karena permasalahan tentang pertanian dan industri domestik tidak ditangani dengan baik oleh RCEP (Marjani, 2019). Hal ini dikarenakan RCEP tidak memberikan ‘bekal’ khusus untuk mengembangkan sektor pertanian dan jasa yang merupakan sektor terkuat di India. Selain itu, dengan defisitnya neraca perdagangan India yang berpotensi semakin memperparah krisis industri domestik, RCEP tidak memberikan jaminan bagi negara-negara pengimpor untuk meminimalisir defisit, serta ‘alarm otomatis’ jika batas ambang impor suatu negara sudah terlampaui (Shekhawat, 2022).

Keraguan pemerintahan Modi untuk bergabung ke dalam negosiasi RCEP disebabkan oleh preferensi kepentingan India yang berubah-ubah akibat kurangnya kepercayaan diri dalam pembangunan dan kekuatan ekonomi (Fangfei, 2020). Berdasarkan Gambar 2.1, anggota RCEP rata-rata bertanggung jawab atas hampir 70 persen dari seluruh defisit perdagangan India (Erken & Every, 2020). Dapat dilihat pada tahun 2011-2012, terjadi peningkatan nilai defisit dengan hampir seluruh negara anggota RCEP hingga melebihi USD 60 miliar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana momentum ini bertepatan dengan terbentuknya RCEP di tahun 2011. Defisit pun kembali meningkat menjadi lebih dari USD 100 miliar di tahun 2017-2018 dan tidak pernah mengalami penurunan secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Jika India menandatangani RCEP, maka kemungkinan besar akan kembali terjadi peningkatan nilai defisit secara signifikan.



Gambar 2.1 Grafik neraca perdagangan India dengan negara anggota RCEP tahun 2000-2018 (dalam USD Miliar)

Sumber: Erken & Every, 2020

Dua faktor utama yang menyebabkan defisit neraca perdagangan India dikaitkan dengan ‘*China factor*’ dan ‘*dairy factor*’¹¹ (Shiino, 2021). Berbicara mengenai ‘*China factor*’, India menganggap bahwa Tiongkok merupakan ancaman serius karena nilai perdagangan bilateral India terhadap Tiongkok mengalami defisit yang nilainya jauh lebih besar daripada negara-negara mitra lain, sebagaimana diproyeksikan pada Gambar 2.6 (Dhar & Rao, 2020). Apabila India terus melanjutkan keanggotaannya di RCEP, maka produk dari Tiongkok yang berharga murah akan semakin membanjiri pasar domestik India¹² (Choudhury, 2019).

Sementara ‘*dairy factor*’, berkaitan dengan citra India sebagai produsen susu terbesar di dunia¹³. Namun, jumlah permintaan susu di India diperkirakan tidak akan sebanyak jumlah produksinya sebagaimana diproyeksikan dalam Gambar 2.2. Jika diperhatikan, *market gap*-nya¹⁴ pun semakin besar seiring berjalannya waktu hingga diperkirakan menyentuh 33 MMT di tahun 2032-2033 (P. Kumar & et. al, 2018). Koperasi susu di India mengalami krisis yang disebabkan oleh pabrik-pabrik berorientasi ekspor yang mengurangi pembelian susu dari peternak, sehingga menyebabkan surplus pada stok susu (National Dairy Development Board, 2019).

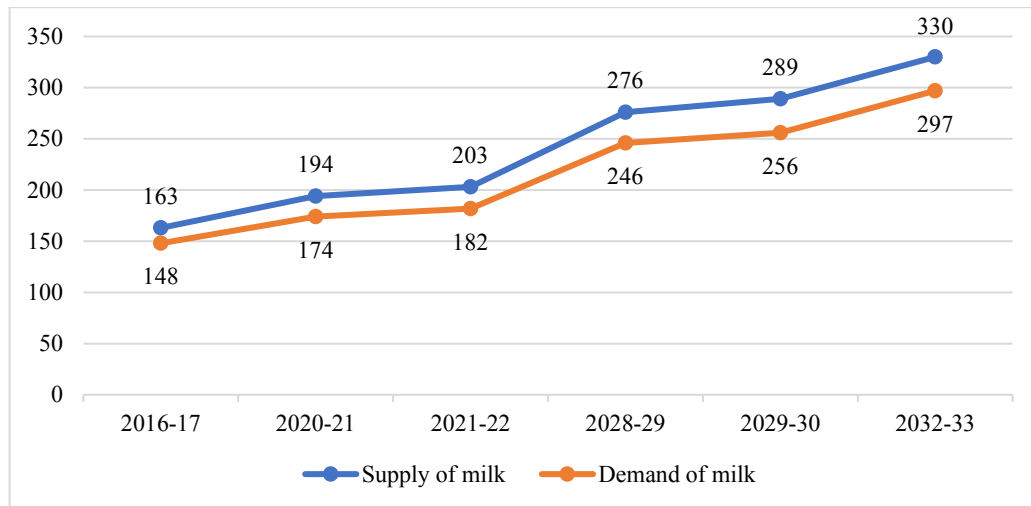
¹¹ ‘*China factor*’ yaitu menghindari keanggotaan di satu FTA dengan Tiongkok, sementara ‘*dairy factor*’ berasal dari penolakan sektor produksi susu domestik.

¹² Di India, produk Tiongkok memiliki ketersediaan yang melimpah dan variasi yang beragam dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu sekitar 10-70% lebih murah dari produk India (Kaur, 2014).

¹³ Sejak tahun 2000 hingga 2015, India terus menduduki peringkat pertama sebagai negara produsen susu terbanyak di dunia. Produksi susu India akan terus meningkat dari 80 juta MT pada tahun 2000, 180 juta MT pada tahun 2018, dan diperkirakan akan menyentuh 330 juta MT (Metrik Ton \approx 907,18 kilogram) pada tahun 2033 mendatang (J. Kumar, 2020)

¹⁴ *Market gap* adalah kondisi di mana terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran di pasar pada produk tertentu.

Di tengah krisis ini, Selandia Baru justru malah menargetkan India sebagai sasaran ekspor produk susu mereka (Sakrar, 2019).



Gambar 2.2 Proyeksi perbandingan permintaan dan penawaran susu di India 2016-2033 (dalam MMT)

Sumber: olah data dari Kumar & et. al, 2018

India masih perlu memperbaiki struktur industri dan sektor manufakturnya yang relatif lemah agar lebih siap untuk bersaing di ranah perdagangan global (Fangfei, 2020). Ekonomi digital juga termasuk salah satu isu penting yang dipertimbangkan India sehingga India tidak mengizinkan akses pasar melalui perdagangan digital. Jika India menandatangani RCEP, program “*Make in India*” yang menjadi ‘wadah’ pengembangan industri domestik India akan terancam (Choudhury, 2019). India yang sudah memiliki perjanjian bilateral dengan 13 negara anggota RCEP, kecuali Tiongkok. Jika India mundur dari negosiasi RCEP, maka tidak akan ada kehilangan yang berarti, justru India akan terhindar dari produk-produk Tiongkok. RCEP juga tidak memberikan jaminan bagi negara-negara pengimpor untuk meminimalisir terjadinya defisit, serta tidak adanya

‘notifikasi’ untuk menghentikan impor ketika ambang batas impor dilanggar (Shekhawat, 2022). Gajendra Singh Shekhawat (2022) yang merupakan Menteri Persatuan Jal Shakti memberikan argumen tentang perbandingan antara RCEP dan “*Make in India*” yang diuraikan secara rinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan antara RCEP dan “*Make in India*”

RCEP	<i>Make in India</i>
Terdapat usulan penghapusan tarif pada 90 persen dari seluruh produk, sehingga pasar India akan terbuka untuk impor besar-besaran. Sementara itu, India tidak diberikan jaminan apa pun dari Tiongkok untuk menghormati peraturan WTO mengenai hambatan non-tarif.	Fokus pada penciptaan swasembada dalam manufaktur di sektor-sektor di mana Tiongkok menciptakan hambatan non-tarif, misalnya sektor <i>active pharmaceutical ingredients</i> (API) dan IT.
Tidak diberikan ‘bekal’ khusus untuk mengembangkan sektor pertanian dan jasa yang merupakan sektor terkuat di India. Sehingga India harus mengandalkan sektor yang lemah	Memiliki skema yang mendorong dominasi sektor-sektor terkuat di India sambil perlahan-lahan mengembangkan sektor yang lemah.
Tidak ada pertimbangan dampak geopolitik dari perdagangan produk tertentu, atau produk yang diperlukan untuk keamanan dan kedaulatan suatu negara.	“ <i>Make in India</i> ” menganggap bahwa perdagangan dapat dijadikan senjata melawan India untuk tujuan geopolitik sehingga di sektor-sektor penting seperti semikonduktor, India membuat PLI <i>scheme</i> senilai USD 10 miliar.

Sumber: olah data dari Shekhawat, 2022

Modi khawatir jika India menandatangani RCEP, akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap industri dalam negeri seperti manufaktur dan pertanian, serta khawatir jika India tidak berhasil bersaing di pasar Asia Pasifik. Kekurangan yang dimiliki India ini tidak dapat diperbaiki dalam jangka pendek. Jika sumber daya domestik tidak dapat dialokasikan untuk menerjemahkan kerugian ekonomi jangka pendek menjadi keuntungan jangka panjang, maka bergabungnya India ke RCEP akan semakin merugikan industri domestik. Perubahan sikap kebijakan India dalam RCEP merupakan proses kalkulasi rasional

atas berbagai kepentingan yang berbeda. Dengan memutuskan untuk mundur dari negosiasi RCEP, artinya terjadi perubahan dalam preferensi kepentingan dan hasil kalkulasi pemerintahan Modi secara signifikan (Fangfei, 2020).

Lebih lanjut, perubahan sifat kebijakan India dalam RCEP juga dipengaruhi oleh lingkungan politik dan ekonomi domestik. Hal ini mengindikasikan kelemahan pemerintahan Modi dalam tata kelola pemerintahan dalam negeri, serta ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan konflik internal dan eksternal. Opini publik mengenai RCEP semakin memanas akibat peluncuran serangkaian reformasi ekonomi pada tahun 2016 yang menyebabkan turunnya pertumbuhan PDB, meningkatnya jurang kesenjangan, dan melonjaknya angka pengangguran. Industri di India pun memberikan tekanan terhadap pemerintahan Modi dalam isu-isu seperti liberalisasi pasar dan reformasi peraturan. Federasi Serikat Buruh India pun meluncurkan pemogokan nasional pada awal tahun 2019 yang melibatkan 200 juta orang. SJM juga meluncurkan protes nasional selama sepuluh hari atas isu RCEP (Fangfei, 2020).

Confederation of All India Traders (CAIT) yang merupakan badan pedagang yang mewakili setengah juta pedagang kecil dan menengah di India menyatakan tidak pernah mendukung keanggotaan India di RCEP (Choudhury, 2019). Banyak petani India percaya bahwa pembukaan pasar yang cepat terhadap produk pertanian asing dapat merugikan mereka. Reformasi skala besar dapat memakan biaya yang besar, bahkan memusnahkan perkebunan kecil milik keluarga yang banyak terdapat di negara ini (S. Gupta & Ganguly, 2020). Sekelompok petani di bawah bendera *Kisan Sangharsh Committee (KSC)* pun melakukan protes di

Jalan Raya Amritsar-Delhi atas keputusan pemerintah untuk bergabung dengan RCEP. Para pengunjung rasa tersebut percaya bahwa klausul pemotongan tarif atas barang-barang impor akan berdampak pada keberlangsungan produksi pertanian (Ani, 2019).

Sikap India dalam menghadapi RCEP pun dipengaruhi oleh struktur dan proses negosiasi di dalamnya. Faktor lain yang menyebabkan keraguan India juga mencerminkan beberapa kelemahan yang mengakar dari forum tersebut, serta kurangnya rasa saling percaya antara India dan anggota RCEP lainnya. RCEP merupakan RTA yang berasal dari pengintegrasian enam negara mitra dari perjanjian ASEAN+1, yang mana lebih sulit daripada membangun RTA yang benar-benar baru. Sehingga banyak menimbulkan dinamika tawar-menawar di antara negara-negara anggota demi mempertahankan kepentingan nasional masing-masing (Fangfei, 2020). Namun, ASEAN sendiri tidak mampu untuk mengoordinasikan perbedaan kepentingan ke dalam satu konsensus karena kurangnya kohesi internal dan sulitnya mencapai “ASEAN *centrality*”. Dengan demikian, negosiasi RCEP lebih menekankan pada proses negosiasi daripada kemajuan yang sebenarnya (Wang, 2013). Secara teknis, ASEAN tidak memiliki kejelasan yang cukup atas isu-isu inti seperti FTA bilateral mana yang akan digunakan sebagai referensi dan bagaimana mengintegrasikan lima FTA bilateral yang berbeda secara organik. Intinya, RCEP hanya berfokus pada liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang dan menghilangkan hambatan tarif di antara negara-negara anggota, yang mana ini jauh dari kepentingan India yang ingin

memanfaatkan keunggulannya dalam perdagangan jasa (A. Mukherjee & Kapoor, 2017).

Rasa kurang percaya India terhadap anggota RCEP lainnya berasal dari keraguan di antara para anggota RCEP mengenai apakah India merupakan bagian dari komunitas Asia-Pasifik, serta ketidaksepakatan yang besar mengenai apakah RTA ini harus mengalihkan fokusnya ke arah Indo-Pasifik. Di satu sisi, ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota dan sikap mereka yang berbeda-beda terhadap India telah menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan arah kerja sama. Di sisi lain, India yang merupakan satu-satunya negara Asia Selatan memberikan kesan terpinggirkan dan “terisolasi secara geografis” bagi India (Fangfei, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa mundurnya India dari negosiasi RCEP merupakan sikap keraguan yang berasal dari tekanan dari dalam negeri dan dari forum RCEP sendiri. Tekanan dari dalam negeri berasal dari *insecurity* atas kekuatan ekonomi India yang belum mumpuni. Selama bergabungnya India di dalam negosiasi RCEP, India malah mengalami peningkatan defisit neraca dengan negara-negara anggota RCEP, terutama Tiongkok. Sementara itu, umumnya FTA akan mengintervensi kedaulatan ekonomi agar negara anggota mengurangi hambatan perdagangannya. Hal ini menjadi ancaman bagi India karena khawatir jika produk asing akan menguasai pasar domestik India, yang mana akan merugikan pebisnis, petani, dan peternak karena mereka berperan dalam mendorong substitusi impor. Masyarakat India pun secara organik tak tinggal diam dengan melakukan unjuk rasa karena merasa dirugikan oleh RCEP. Oleh karena itu, opini publik

merupakan salah satu faktor utama dari mundurnya India dari negosiasi RCEP. Lebih lanjut, tekanan dari forum RCEP, yang mana berasal dari struktur dan proses negosiasi. ASEAN sebagai pencetus RCEP kesulitan dalam mengintegrasikan kepentingan negara anggota ke dalam satu konsensus. RCEP juga kurang memwadahi perdagangan jasa yang merupakan kepentingan India. India yang secara geografis bukan merupakan negara Asia Pasifik pun memiliki kesan terkucilkan di dalam forum ini. Oleh karena itu, mundurnya India dari negosiasi RCEP berasal dari proses rasionalisasi organik atas kalkulasi untung rugi yang dilakukan oleh pemerintahan Modi.

2.2. Ekonomi Politik India Era Kepemimpinan Narendra Modi

Narendra Modi mulai menjabat sebagai Perdana Menteri India pada 26 Mei 2014, berasal dari partai BJP yang merupakan partai nasionalis Hindu sayap kanan (Bharatiya Janata Party, 2014). Beliau merupakan perdana menteri India pertama yang berasal dari *Other Backward Class* atau kelas terbelakang, yang mana beliau sangat memahami dinamika politik dibandingkan dengan para pendahulunya. Oleh karena itu, beliau menjadi semangat baru bagi masyarakat India yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Keterbukaan Modi dengan generasi modern dan penggunaan media sosial sangat memudahkan publik untuk memberikan aspirasi (Palit, 2015). Berdasarkan kampanyenya yang bertajuk "*Achhe din aane waale hein*" yang berarti "hari-hari baik akan datang", visi utama Modi adalah mendorong pertumbuhan dan pembangunan bagi negara dan rakyatnya, serta melakukan reformasi ekonomi di dalam negeri dan diimbangi dengan kebijakan ekonomi luar

negeri yang antusias dan pro-kapitalis (Narlikar, 2022). Selain itu, terdapat istilah “*Modinomics*” untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh Modi untuk mengembalikan India ke lintasan pertumbuhan yang tinggi sebagaimana telah terjadi pada awal tahun 2000-an (Jha, 2018).

2.2.1. Tantangan perekonomian domestik India

Berdasarkan data tahun 2017, pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade adalah sebesar 7,1 persen, yang mana ini lebih cepat jika dibandingkan dengan akhir abad ke-20. Percepatan pertumbuhan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap PDB agregat, tetapi juga terhadap PDB per kapita. Laju rata-rata pertumbuhan per kapita dalam satu dekade terakhir adalah 5,5 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, India merupakan negara terunggul. Laju pertumbuhan India pun stabil karena stabilisasi di tiga sektor utama India: pertanian, manufaktur, dan jasa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan terdiversifikasi secara luas. Secara spesifik, pertumbuhan telah meningkat paling cepat di sektor jasa, diikuti oleh industri, dan paling sedikit di sektor pertanian (P. Gupta, 2018).

Akan tetapi, pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020, laju pertumbuhan ekonomi India sempat melambat akibat kebijakan demonetisasi dan Goods and Services Tax (GST) yang merupakan ‘*human error*’ dari pemerintah (Inamdar & Alluri, 2021). Untuk mendorong transaksi digital, demonetisasi dilakukan dengan menarik 86 persen uang tunai di pasaran, serta menghentikan peredaran uang kertas Rs 500 dan Rs 1000 (Chodorow, 2019). Sementara GST adalah kebijakan pajak tidak langsung atas barang dan jasa untuk menyederhanakan sistem pajak (Bopana,

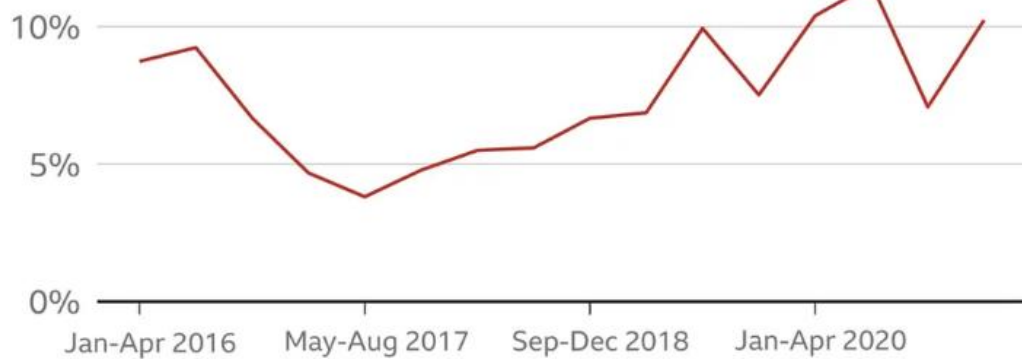
2024). Kedua kebijakan tersebut dikatakan ‘*human error*’ karena dalam adaptasi pemberlakuannya malah menyebabkan gangguan ekonomi jangka pendek. Pelaku UMKM merupakan kelompok yang paling terguncang karena sebagian besar dari mereka bergantung pada uang tunai, sementara kebijakan GST malah membuat mereka harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar (Goel, 2024). Tabel 2.4 merupakan proyeksi angka laju pertumbuhan ekonomi India pada periode 2014-2019.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi India Periode 2014-2019 (dalam %)

2014	2015	2016	2017	2018	2019
7,4	8,0	8,2	7,1	6,8	4,2

Sumber: Olah data dari berbagai sumber, 2024

Kedua kebijakan ‘*human error*’ tersebut secara tidak langsung juga menaikkan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di India pada Desember 2018 melonjak hingga 7,4 persen, ini merupakan angka tertinggi dalam 15 bulan. Tren peningkatan pengangguran terjadi secara terus menerus sejak 2013-2014, kemudian meningkat tajam pada 2018. Menurut Radhicka Kapoor (2019), sekitar setengah pekerja India adalah pekerja mandiri, bukan wirausahawan. Sehingga mereka tidak mungkin memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Masyarakat India terpaksa bekerja mandiri karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan tetap (MS, 2019). Hal ini diakibatkan preferensi pelaku wirausaha di India yang lebih menyukai ekspansi padat modal, daripada padat karya (BBC, 2017). Gambar 2.3 merupakan proyeksi angkat pengangguran di India, bahkan mencapai tingkat tertingginya pada 2020.



Gambar 2.3 Peningkatan angka pengangguran 2016-2021

Sumber: Inamdar & Alluri, 2021

Komposisi sektor utama perekonomian India terdiri dari sektor jasa, pertanian, dan manufaktur. Dalam 50 tahun pertama setelah kemerdekaan, kontribusi sektor jasa India terhadap PDB mencapai lebih dari 60 persen. Sub sektor jasa terbesar di India berada pada industri *financial technology*, kesehatan, pariwisata, ruang angkasa, logistik, dan transportasi. Dalam periode pertama era kepemimpinan Modi, pemerintah memberikan kemudahan berbisnis sektor jasa dan berhasil meningkatkan FDI yang berdampak pada pembangunan infrastruktur. Namun, sektor jasa masih mempekerjakan hanya 25 persen dari seluruh masyarakat berusia produktif. Sehingga lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung stagnan dan sektor manufaktur yang belum stabil. Tabel 2.5 memproyeksikan perbandingan India dengan Tiongkok dan AS dalam persentase PDB dan penyerapan tenaga kerja di setiap sektor tertulis (Lakshmanan, 2019).

Tabel 2.5 Perbandingan PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja Setiap Negara pada Sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa Tahun 2014-15 (%)

Sektor	India	AS	Tiongkok
Pertanian	15,4; 53	8; 2	7; 26
Manufaktur	23; 22	12; 19	40; 28
Jasa	61,5; 25	80; 79	52; 46

Catatan: dari kiri ke kanan (PDB; penyerapan tenaga kerja)

Sumber: Lakshmanan, 2019

Sektor jasa di India diketahui memiliki elastisitas ketenagakerjaan tertinggi di antara semua sektor, sehingga memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Sebagai solusi, Modi telah mengerahkan program *Skill India* untuk mendorong inisiatif sektor swasta dalam program pengembangan keterampilan. Namun, sektor jasa masih mempekerjakan hanya 25 persen dari seluruh masyarakat berusia produktif. Lapangan pekerjaan masih didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung stagnan dan sektor manufaktur yang belum stabil. Sehingga India membutuhkan sebuah strategi untuk menyeimbangkan kontribusi sektor jasa dengan sektor pertanian dan manufaktur. Oleh karena itu, India perlu meningkatkan nilai tambah sektor jasanya. Sektor jasa di India memiliki elastisitas ketenagakerjaan tertinggi di antara semua sektor, sehingga memiliki potensi pertumbuhan yang besar (Lakshmanan, 2019).

Sejak merdeka, India memiliki tekad untuk mencapai swasembada pertanian yang membuat negara ini memiliki pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi. Dengan ketergantungan yang kecil terhadap impor, PDB sektor pertanian India mencapai angka USD 262 miliar. Namun, para petani India tidak bernasib baik dan hanya sepertiga dari seluruh pelaku sektor pertanian yang berhasil membukukan keuntungannya. Selain faktor cuaca, tantangan yang dihadapi oleh para petani di India berasal dari kurangnya edukasi mengenai teknologi pertanian

dan rantai pasok yang tidak efisien (Goedde et al., 2018). Oleh karena itu, Modi berinisiatif untuk menghapus permasalahan tersebut dan menggandakan pendapatan petani. Berangkat dari kesadaran Modi akan dominansi sektor pertanian, langkah awal yang akan dilakukan adalah menciptakan sistem yang mengubah kegiatan pertanian menjadi pusat produktivitas dan kemakmuran (R. M. Singh, 2017).

Berdasarkan data World Bank tahun 2014, sektor manufaktur di India tergolong stagnan dengan menyumbang sekitar 16 persen PDB (Roy, 2014). Pada 2025, sektor manufaktur India ditargetkan untuk memperoleh sekitar 25 sampai 30 persen dari keseluruhan PDB. Dengan angka tersebut, sektor manufaktur India dapat setara dengan Tiongkok, Jerman, Jepang, dan AS. Sub sektor manufaktur utama India berada pada industri logam, pertambangan, otomobil, industri berat, bahan kimia mentah, komponen elektronik, dan semen. Pada saat itu, pemerintah berencana untuk membangun National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) untuk kegiatan industri. Rencananya, NIMZ akan memiliki sistem perizinan satu pintu dan pemerintah akan memberikan kemudahan melalui beberapa regulasi (KPMG, 2014). Program nasional utama Modi dalam mengembangkan sektor manufaktur adalah Make in India. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan, melindungi kekayaan intelektual, dan membangun infrastruktur terbaik di India (Make in India, 2014).

Inisiatif seperti Make in India dan reformasi terkait kebijakan FDI, *Ease of Doing Business* (EoDB), Startup India, dan Digital India telah memainkan peran

utama untuk meningkatkan kepercayaan investor. Melalui kebijakan ramah investor berbasis digital tersebut, India berupaya menciptakan ekosistem yang mandiri, diversifikasi sektor-sektor bisnis, dan menciptakan jalan untuk pengembangan manufaktur (Athar & Tanna, 2019). Dalam meningkatkan investasi, Modi menghapus undang-undang kuno dan menggantinya dengan regulasi yang prediktabilitas dan berkeadilan (Mulrenan, 2017).

Kaum akar rumput seperti pelaku UMKM juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi India. Secara khusus, UMKM menjadi faktor kunci dalam mengembangkan sumber daya manusia di area pedesaan (Zanjurne, 2018). Sektor ini berkontribusi pada ekspor, hasil industri, penciptaan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Total UMKM di India adalah 63,4 juta dengan menyumbang lebih dari 30 persen PDB dan 45 persen ekspor. Sekitar 120 juta orang bergantung pada sektor ini, sehingga menjadikannya pemberi kerja terbesar kedua di India. Terdapat empat sub sektor, yaitu manufaktur, listrik, perdagangan, dan jasa. Pada era pemerintahan Modi, beliau berupaya menjawab permasalahan UMKM dalam hal kesulitan akses kredit. Transisi ke pasar digital juga dilakukan demi memudahkan pemasaran dan akses pasar global. Namun, UMKM pun masih harus menghadapi tantangan, di antaranya yaitu kesulitan akses kredit, *culture-shock* kemajuan teknologi, sulitnya promosi pemasaran, tingkat inflasi, efektivitas biaya, kurangnya peningkatan keterampilan SDM, ketatnya persaingan, maraknya penipuan, dan tingkat produksi yang rendah. Pemerintah telah berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai pendekatan. Namun, akibat minimnya tingkat pengetahuan dan literasi pelaku

UMKM—khususnya di pedesaan—membuat pendekatan tersebut kurang efektif (P. K. Gupta, 2023).

Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan perekonomian India sempat terguncang akibat kebijakan demonetisasi dan GST yang merupakan ‘*human error*’ pada era pemerintahan Modi. Walaupun secara garis besar Modi telah memberikan solusi kepada tiga sektor utama di India tersebut, nyatanya masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pengangguran yang meningkat diketahui disebabkan oleh masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan tetap dan terpaksa bekerja secara mandiri dari pekerjaan tidak tetap.

2.2.2. Strategi ekonomi politik internasional India

Dalam satu tahun era kepemimpinannya, Palit (2015) menyimpulkan bahwa pola strategi ekonomi politik internasional Modi adalah dengan melibatkan Barat dan Timur dengan intensitas yang hampir sama, atau disebut sebagai “*Act East, Link West*”. Tujuan diterapkannya pola tersebut adalah untuk menjadikan India yang proaktif sebagai aktor global dan regional, menciptakan ketersinambungan antara keterlibatan internasional dan kepentingan nasional, serta memprioritaskan pertumbuhan ekonomi domestik di tengah keterlibatan eksternal (Palit, 2015). Strategi “*Act East Policy*” merupakan sarana diplomatik yang berbasis pada tiga pilar utama: mekanisme kelembagaan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan strategi bersama. Melalui “*Act East Policy*”, India berhasil menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN, serta menciptakan mekanisme bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan (Kesavan, 2020).

Dikarenakan Modi merupakan Perdana Menteri India pertama yang lahir setelah kemerdekaan, visi Modi memiliki pengaruh yang lebih kontemporer. Sehingga strategi ekonomi politik internasionalnya cenderung mengarah ke '*multi-alignment*'. Dibuktikan pada keterlibatan India dalam beberapa forum global seperti SAFTA, ASEAN, G20, BRICS, SCO, dan ASEM (Palit, 2015). Beberapa forum tersebut menguntungkan bagi India, misalnya SAFTA yang berupaya menstabilkan pasokan domestik di masing-masing negara sehingga dapat meminimalisir ketergantungan pada impor dari luar kawasan (Putra, 2018).

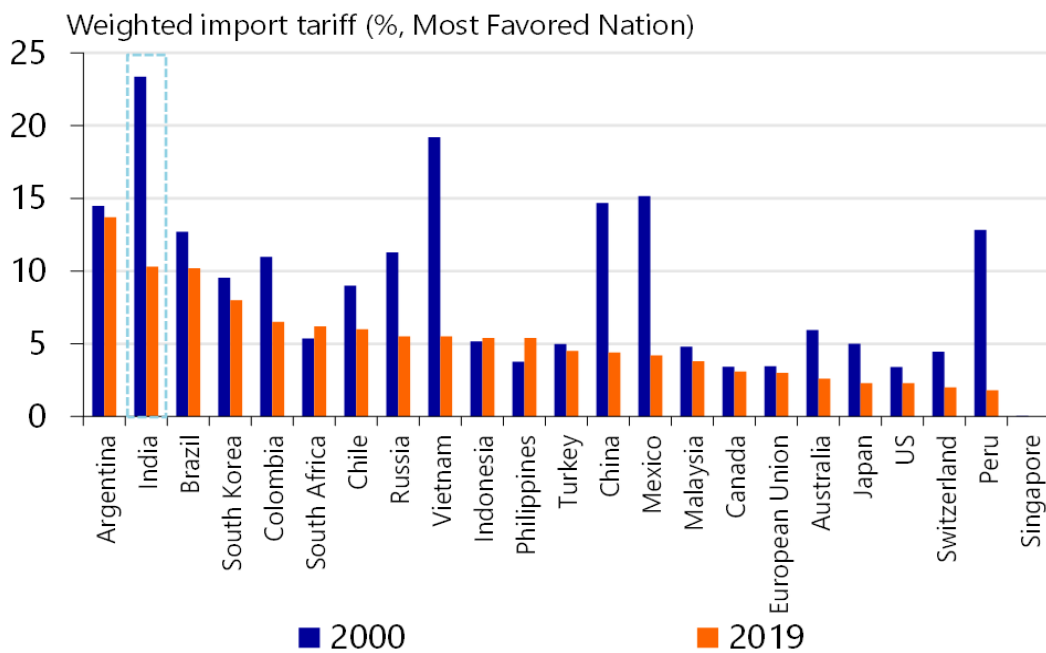
Sejak era pemerintahan Modi, tiga perjanjian telah dibuat dengan Mauritius, Uni Emirat Arab (UEA), dan Australia (PTI, 2024). Begitupun dengan Inggris, India sepakat untuk menggandakan perdagangan, senilai £25,5 miliar pada tahun 2019 dan menandatangani perjanjian tentang migrasi dan mobilitas yang akan memberikan lapangan pekerjaan bagi 3.000 masyarakat India setiap tahunnya. Selain itu, Eropa dan India pun secara konstruktif sedang berupaya untuk mencapai kesepakatan karena tekanan geopolitik atas kebangkitan Tiongkok. Namun, dalam perundingannya terjadi dinamika yang menunjukkan bahwa India sangat gencar mempertahankan kepentingan nasionalnya. Misalnya, India mendesak agar negosiasi perdagangan dan investasi dilakukan secara terpisah, sehingga mengakibatkan biaya investasi yang lebih tinggi dan ketidakpastian di kalangan investor Eropa (Joshi, 2021).

Dalam posisinya sebagai anggota WTO, India berusaha untuk menjadi pemain kunci dengan strategi perilaku bernegosiasinya. India cenderung skeptis terhadap perdagangan global dan lebih bersikap defensif. Demi mencapai

kepentingannya, India sering kali mendorong adanya reformasi aturan internasional daripada menerapkan aturan yang sudah ada (Narlikar, 2022). Sebagaimana pada sengketa “*India-Solar Cells*” yang mana India menunda kepatuhannya terhadap aturan WTO dan baru mengadopsi kebijakan setelah kalah dalam sengketa demi melindungi kebijakan pembangunan “*Make in India*” dan “*Invest in India*”. Sementara pada sengketa “*India-Export Related Measures*” India cenderung mematuhi aturan WTO karena India memiliki ruang untuk mengejar kebijakan alternatif dengan mereformasi kebijakan *Special Economic Zone (SEZ)* yang sebelumnya gagal (Mate, 2020). India juga sering kali menggunakan strategi negosiasi distributif dengan menolak memberikan konsesi, mengancam untuk menahan isu-isu yang menguntungkan negara lain, dan menempatkan posisi tawar yang tidak menguntungkan pihak lain daripada mencari solusi bersama. Dalam WTO pun India cenderung membentuk koalisi bersama negara-negara berkembang dan sering kali menjadi pemimpin dalam koalisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa India mencari kekuatan dari aksi kolektif demi mencapai kepentingannya (Narlikar, 2022).

India di bawah pimpinan Modi pun cenderung bersikap proteksionis terhadap perdagangan asing dengan menaikkan tarif dari 13,5 persen menjadi 17,1 persen pada 2018, dan kemudian menaikkannya lagi menjadi 17,3 persen pada 2019. Angka tersebut menjadikan India sebagai negara dengan tarif rata-rata tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik seperti Tiongkok (7,6%), Thailand (9,3%), Filipina (6,1%) dan lain sebagainya (Shiino, 2021). Gambar 2.3. menunjukkan bahwa India menempati peringkat kedua setelah Argentina dalam

tarif impor rata-rata tertimbang tahun 2019. Sehingga menjadikan India sebagai pemilik tarif impor rata-rata tertimbang terbesar di antara negara-negara Asia Pasifik.



Gambar 2.4 Grafik tarif impor rata-rata tertimbang
Sumber: Erken & Every, 2020

Modi cenderung menaikkan tarif barang yang memiliki keunggulan komparatif seperti produk jahitan dan alas kaki. Sekitar 45,3 persen dari keseluruhan barang atau 2.319 barang mengalami kenaikan tarif. Sebagaimana diproyeksikan pada Gambar 2.4, kenaikan tingkat tarif rata-rata untuk produk jahitan adalah dari 9,9 persen pada tahun 2017 menjadi 25 persen, serta alas kaki meningkat dari 10 persen menjadi 23,8 persen, yang mana ini tergolong signifikan. Tarif untuk produk tekstil seperti benang dan kain juga dinaikkan dari 9,9 persen menjadi 23,1 persen. Peningkatan tarif secara signifikan juga diterapkan pada produk manufaktur yang telah sukses diproduksi di dalam negeri seperti baja dan peralatan transportasi. Sementara produk yang masih memiliki ketergantungan

tinggi pada impor seperti peralatan listrik, mesin, dan *precision equipment* hanya dinaikkan sedikit. Sementara itu, hanya 30 item yang mengalami penurunan tarif (Shiino, 2021).



Gambar 2.5 Perubahan tingkatan tarif rata-rata, serta rasio barang yang tarifnya dinaikkan dan diturunkan dari industri besar di India (2017-2019)

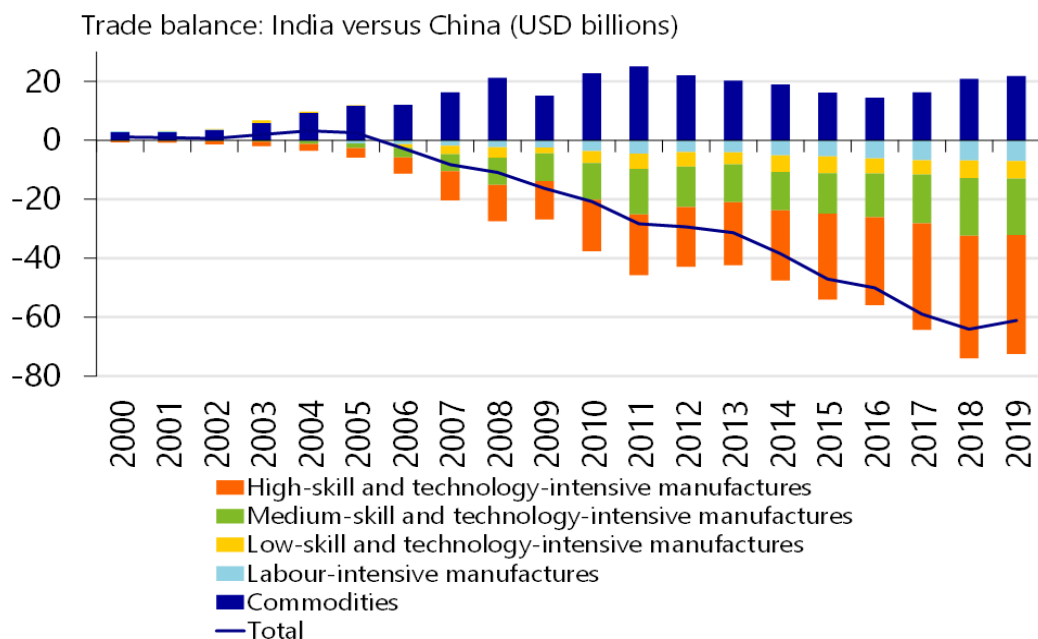
Catatan: Jumlah barang yang dikurangi tarifnya ditampilkan dengan angka negatif. Angka yang diberi tanda kurung di bawah klasifikasi sektor industri adalah rasio jumlah barang yang mengalami kenaikan tarif

Sumber: Shiino, 2021

Jika melihat rasio jumlah barang yang terkena kenaikan tarif terhadap jumlah total barang pada setiap klasifikasi sektor industri pada Gambar 2.5, seluruh barang yang tergolong dalam sektor produk jahitan, alas kaki, dan baja mengalami kenaikan tarif. Sementara itu, dalam sektor tekstil, hanya 99 persen barang yang mengalami kenaikan. Sedangkan pada sektor peralatan listrik, mesin, dan *precision equipment* kenaikan tarif hanya berkisar 27,2 persen, atau dapat dikatakan barang-barang dalam sektor tersebut dinaikkan secara selektif. Pemberlakuan kenaikan tarif dengan alasan apapun untuk hampir seluruh kategori sektor industri terutama

untuk sektor padat karya sebagaimana yang diterapkan India dapat dicirikan sebagai kebijakan proteksionisme. Hal ini diperkuat dengan India yang cenderung selektif dengan meningkatkan tarif produk yang memiliki keunggulan komparatif (Shiino, 2021).

Mengenai hubungan perdagangan India dan Tiongkok, pada 2015, kedua negara pernah sepakat untuk memperkuat kemitraan pembangunan demi kemakmuran masing-masing negara, salah satunya adalah dengan menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi serta memfasilitasi akses pasar yang lebih besar bagi perekonomian masing-masing. Selain itu, keduanya telah memutuskan untuk menaruh perhatian jika terjadi ketidakseimbangan perdagangan bilateral (Ministry of External Affairs, 2015).



Gambar 2.6 Neraca perdagangan India terhadap Tiongkok (USD billions)

Sumber: Erken & Every, 2020

Namun, jika hubungan keduanya semakin erat, maka semakin besar pula impor produk manufaktur berteknologi tinggi dari Tiongkok. Sebagaimana

diproyeksikan pada Gambar 2.6, ekspor India cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan hanya terdiri dari sejumlah komoditas pertanian. India tidak dapat menyaingi pertumbuhan ekspor Tiongkok ke India. Jika India tidak memiliki basis industri dan teknologi yang kuat, maka India akan terus berada dalam posisi inferior dibandingkan Tiongkok, atau akan selalu bergantung pada Tiongkok dalam hal teknologi (Erken & Every, 2020).

Melihat uraian tersebut, dapat dipahami bahwa India menggunakan gagasan “*Act East, Look West*” dalam praktik ekonomi politiknya guna menyeimbangkan pengaruhnya ke Barat dan Timur. Kepentingan nasional dan eksternal juga turut diselaraskan. Modi memiliki preferensi “*multi-alignment*” sehingga India banyak menjalin kerja sama ekonomi dengan beberapa negara dan forum global. Namun, dalam keberjalanan suatu forum, India cenderung ‘egois’ bahkan bersikap ‘agresif’ demi mencapai kepentingan melalui strategi negosiasi distributifnya. Dalam menerima produk asing pun India menjadi salah satu negara paling proteksionis dengan tarif yang tinggi. Perdagangan India dengan Tiongkok sebagai mitra terbesarnya pun tidak setara karena ekspor India ke Tiongkok cenderung stagnan, sementara impor barang Tiongkok terus melonjak. Ketidakseimbangan tersebut juga disebabkan oleh India hanya mampu mengekspor produk pertanian, sementara komoditas impor Tiongkok adalah barang berteknologi tinggi. Jika India tidak mampu menyetarakan kekuatan produksi Tiongkok, maka ketergantungan akan terus berlangsung.

2.3. *Swadeshi* dalam Praktik Ekonomi Politik India

Ajaran *Swadeshi* dari Gandhi pun terus menyebar ke seluruh penjuru negeri sejak zaman penjajahan. Berikut diuraikan secara rinci bagaimana awal mula kebangkitan *Swadeshi* pada zaman kolonial Inggris, implementasi *Swadeshi* pasca restrukturisasi ekonomi India 1991, hingga implementasi *Swadeshi* pada masa kepemimpinan Narendra Modi.

2.3.1. *Swadeshi Movement: Asal muasal kebangkitan Swadeshi di India*

Tidak ada yang tahu pasti kapan nilai *Swadeshi* lahir di kehidupan bermasyarakat India. Namun, yang jelas *Swadeshi* sudah mulai dipopulerkan sejak *Swadeshi Movement* pada 1905. Bahkan, beberapa dekade sebelum lahirnya *Swadeshi Movement*, semangat *Swadeshi* diketahui telah menyebar luas hampir ke seluruh penjuru negeri. Tabel 2.6 berikut menguraikan perkembangan nilai *Swadeshi* sebelum lahirnya *Swadeshi Movement*.

Tabel 2.6 *Swadeshi* pada Era pra-*Swadeshi Movement* 1905

Tahun	Perkembangan
1867	Zaman Hindu Mela di mana gagasan mengenai ekonomi <i>Swadeshi</i> telah berkembang secara perlahan.
1870-an	Promosi nilai <i>Swadeshi</i> sudah dimulai di Gujarat dan Deccan.
1891	Sebuah industri berprinsip <i>Swadeshi</i> didirikan di Kalkuta, tetapi berhenti setahun setelahnya.
1897	Rabindra Nath Tagore menghidupkan industri <i>Swadeshi</i> kembali dengan membuka <i>Swadeshi Bhandar</i> ¹⁵ di <i>Harrison Road</i> , Kalkuta.
1901	Barrister Jogesh Chandra Chaudhury ¹⁶ pertama kali mengadakan bazar produk-produk industri <i>Swadeshi</i> sebagai bagian dari <i>National Congress</i> . Kemudian diikuti dengan pendirian <i>Indian Stores</i> di <i>Bowbazar Street</i> , Kalkuta, untuk penjualan barang-barang <i>Swadeshi</i> ke depannya.

¹⁵ *Swadeshi Bhandar* merupakan industri bersifat non-politis yang bertujuan untuk mendorong penjualan produk-produk domestik dan mendirikan sekolah industri untuk melatih beberapa pemuda dalam bidang seni rupa murni.

¹⁶ Salah satu pelopor pertama dalam kebangkitan industri.

1902	Satis Chandra Mukerjee mendirikan <i>Dawn Society</i> untuk mengorganisir “ <i>Swadeshi Stores</i> ” untuk mempromosikan manufaktur lokal ¹⁷ . <i>Dawn Society</i> merupakan salah satu elemen dari awal <i>Swadeshi Movement</i> pada tahun 1905.
1904	<i>Chhatra Bhandar</i> yang merupakan organisasi semi-politik didirikan, yang berfungsi sebagai sebuah toko <i>Swadeshi</i> dan pusat propaganda ¹⁸ politik.

Sumber: olah data dari Mukherjee & Mukherjee, 1958

Dengan demikian, semangat *Swadeshi* telah menyebar ke seluruh penjuru negeri bahkan sebelum tahun 1905. Walaupun *Swadeshi* sudah diterima oleh masyarakat secara teori, tetapi dalam praktiknya masih sangat minim dukungan. Hal ini diduga diakibatkan oleh pemikiran masyarakat yang masih kuno, sehingga tidak mampu menerjemahkan suatu teori ke dalam praktik. Dalam keadaan masyarakat yang demikian, akhirnya terjadi guncangan dari kolonial Inggris untuk memecah Benggala. Namun, masyarakat Benggala dengan segera membangkitkan harga diri mereka (H. Mukherjee & Mukherjee, 1958).

Swadeshi Movement merupakan sebuah gerakan nasionalis pertama di India yang diinisiasikan pada 1905. Gerakan ini muncul setelah pemecahan wilayah Benggala menjadi dua bagian oleh Inggris dengan alasan efisiensi administrasi (M. Goswami, 2004). Padahal, motif asli dari pembagian wilayah Benggala adalah untuk melemahkan Kongres dan Gerakan Nasional dikarenakan Benggala merupakan pusat kegiatan politik di masa itu. Kaum nasionalis yang mengetahui motif tersebut melakukan seruan untuk *Swadeshi* di bawah kepemimpinan Gokhale. Wilayah Benggala dipecah atas dasar dua alasan: bahasa dan agama. Pemecahan dengan dasar bahasa membuat orang Bengali menjadi minoritas dengan 17 juta

¹⁷ Upaya-upaya yang dikerahkan *Dawn Society* dilakukan mulai dari orasi dan bazar, serta mengorganisir penjualan dan propaganda melalui surat kabar.

¹⁸ Propaganda yang diinisiasikan oleh Indra Nath Nandy dan Abinash Chakravarti dilakukan dengan mengunjungi berbagai tempat di seluruh penjuru negeri, menjual produk *Swadeshi*, mengadakan pertemuan, serta memulai klub-klub olahraga dan asosiasi lainnya.

penutur bahasa Bengali, serta 37 juta penutur Bahasa Hindi dan Oriya (Tasneem, 2015). Sementara atas dasar agama adalah untuk mengadu kaum Muslim di Benggala Timur yang komunal dengan kaum Hindu di Benggala Barat yang nasionalis (M. Goswami, 2004). Dalam pidatonya, Risley selaku menteri dalam negeri pemerintah mengatakan “*Bengal united is power, Bengal divided will in several different ways*” yang mencerminkan rencana jahat Inggris (H. Mukherjee & Mukherjee, 1958).

Protes antara kaum anti-nasionalis dan pro-*Swadeshi* pun meletus secara spontan setelah publikasi draf-draf untuk pemecahan Benggala di Desember 1903. Dalam dua bulan pertama setelah publikasi tersebut, sudah terjadi sekitar 500 protes yang diadakan di Benggala Timur. Pada 1903 hingga 1905, kelompok nasionalis hanya mengandalkan metode-metode moderat seperti petisi, memorandum, pidato, pertemuan publik, serta menyebarkan pamflet atau surat kabar. Namun, metode ini tidak menghasilkan tekanan yang cukup kepada oposisi. Pemerintah Lord Curzon justru malah mengumumkan pemecahan Benggala pada 19 Juli 1905 (Tasneem, 2015).

Hal ini tidak membuat semangat kaum nasionalis padam. *Swadeshi Movement* akhirnya memproklamkan keputusan untuk memboikot barang-barang asing pada 7 Agustus 1905. Namun, pemerintah Lord Curzon tetap akan melakukan pemecahan Benggala pada 16 Oktober 1905. Akhirnya, pada hari tersebut, Surendranath Bannerjee dan Anand Mohan Bose berpidato di sebuah pertemuan besar hingga mengumpulkan dana sebesar Rs 50.000 untuk mendukung *Swadeshi Movement*. Hari tersebut juga menjadi hari berkabung di seluruh wilayah Benggala.

Di Kalkuta, masyarakat merayakan hari berkabung dengan berjalan tanpa alas kaki, mandi di Sungai Gangga, dan menyanyikan lagu pergerakan berjudul “*Vande Mataram*”. Orang-orang mengikatkan *rakhi*—yang merupakan gelang khas India—di tangan satu sama lain sebagai tanda solidaritas dari dua bagian Benggala yang terpecah. Pesan dari kaum nasionalis *Swadeshi* untuk memboikot barang-barang asing pun menyebar ke seluruh negeri. Kaum nasionalis militan pun mendukung untuk memperluas *Swadeshi Movement* ke wilayah lain di India. Sehingga *Swadeshi* pun menjadi sebuah perjuangan massa politik yang penuh dengan tujuan *Swaraj* (Tasneem, 2015).

Setelah tahun 1905, para ekstremis nasionalis mendominasi pergerakan *Swadeshi Movement*. Metode pemboikotan pun semakin diperluas mencakup pemboikotan lembaga pendidikan, peradilan, dan pemerintahan milik penjajah. Hal ini bertujuan agar penjajah Inggris tidak dapat melakukan pergerakan. Sebagai penggantinya, didirikanlah industri dan institusi lokal yang berideologi nasionalis. Pada Agustus 1906, didirikan *National Council of Education* yang mempopulerkan kegiatan belajar-mengajar dalam bahasa daerah. Pemboikotan institusi pendidikan Inggris menyebabkan perkembangan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi nasional yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar (Tasneem, 2015).

Pengaruh paling menonjol dari *Swadeshi Movement* adalah dalam aspek budaya yang berupaya mempromosikan proyek filosofis, estetika, dan budaya baru yang bertujuan untuk mengatasi keberlangsungan nilai-nilai Barat di India (M. Goswami, 2004). Kemajuan signifikan terlihat dalam literatur pada umumnya, serta

literatur Bengali pada khususnya. *Swadesh Bandhab Samiti*¹⁹ milik Ashwini Kumar Dutta menjadi populer dan memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran politik. Kesadaran politik diciptakan melalui ceramah, lagu-lagu *Swadeshi*, pelatihan fisik dan moral, dan lain sebagainya. Lagu-lagu dari Rabindranath Tagore, Rajanikant Sen, Mukund Sen, dan Dwijendralal Ray menjadi populer karena memberikan semangat patriotisme. Dalam bidang seni lukis pun Abanindranath Tagore mendobrak dominasi naturalisme Victoria atas seni India dan mengambil inspirasi dari lukisan-lukisan Mughal, Ajanta, dan Rajput (Tasneem, 2015).

Pada tahun 1905-1906, beberapa tokoh masyarakat nasionalis menganggap bahwa konsep *Swadeshi* bukan semata-mata hanya konsep ekonomi belaka. Surendra Nath Banerja (1906) mengatakan bahwa masyarakat India harus mengamalkan nilai *Swadeshi* dan nasionalisme dalam segala aspek, mulai dari metode pendidikan hingga pembangunan. Satis Chandra Mukerjee (1906) dalam *True Character of the Swadeshi in Bengal* mengungkapkan bahwa *Swadeshi Movement* bukan sekadar gerakan ekonomi atau industri, tetapi gerakan yang bersifat patriotik²⁰. Oleh karena itu, esensi dari *Swadeshi Movement* adalah sebuah gerakan moral yang bertujuan membangkitkan kesadaran moral seluruh rakyat dalam menghadapi dengan kekuatan birokrasi pemerintah Inggris. Bipin Chandara Pal (1908) mengatakan dalam artikelnya yang berjudul *The Bed-Rock of Indian Nationalism* bahwa *Swadeshi Movement* merupakan “gerakan spiritual” yang

¹⁹ *Swadesh Bandhab Samiti* merupakan organisasi sosiokultural yang memiliki visi untuk mempromosikan produk lokal dan memboikot barang-barang asing (Ziauddin, 2023).

²⁰ Apabila *Swadeshi Movement* merupakan gerakan ekonomi murni, partisipasi akan terbatas hanya dari kalangan pebisnis saja.

bertujuan bukan hanya untuk pengembangan ekonomi dan politik, melainkan emansipasi untuk seluruh rakyat (H. Mukherjee & Mukherjee, 1958).

Nasionalis India mencoba menggabungkan tuntutan politik *Swaraj* dengan ideologi ekonomi *Swadeshi*. Pada 1906, *Swadeshi* secara resmi disahkan oleh *Indian National Congress* sebagai *Swadeshi Swaraj (national self-government)* (M. Goswami, 2004). Dalam filsafat Mahatma Gandhi, *Swaraj* berarti kebebasan untuk memerintah diri sendiri di tingkat individu atau kebebasan bagi setiap orang untuk memerintah dirinya sendiri (Anjaneyulu, 2003). *Swadeshi* akan berfungsi sebagai landasan ekonomi untuk mencapai *Swaraj*. Dapat dikatakan bahwa konsumsi dan produksi produk-produk domestik dianggap sebagai langkah penting menuju kemandirian politik dan ekonomi. Penyatuan kedua ide tersebut menjadi fondasi dari visi nasionalisme India, serta identitas nasional India (M. Goswami, 2004).

Pada pertengahan tahun 1908, *Swadeshi Movement* mengalami kemunduran. Hal ini difaktori oleh pemerintah yang melihat potensi dari gerakan ini, sehingga mereka dilarang mengadakan pertemuan publik, pawai, dan pers. Adanya pertikaian internal juga turut melemahkan gerakan ini. Gerakan ini pun tidak memiliki struktur organisasi atau partai yang jelas. Selain itu, gerakan ini meredup karena pada dasarnya, gerakan massa tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama terutama apabila mengalami dengan penindasan (Chandra et al., 1989:111-112). Upaya *Swadeshi* pun mulai bergeser dari produk industri ke arah perbankan, asuransi, dan *inland trade* yang mana keuntungan lebih mudah diperoleh dan hanya butuh sedikit modal. Ide-ide *Swadeshi* dalam konteks ekonomi yang disebarkan tidak selalu diterima oleh setiap sektor (Ravichandran, 2015).

Mahatma Gandhi memang tidak turut andil secara langsung dalam *Swadeshi Movement*. Hal ini dikarenakan beliau memiliki agenda perjuangan di Afrika Selatan untuk melawan diskriminasi komunitas India di sana sejak 1893 hingga 1914—hingga kepulangannya ke India pada 1915 (High Commission of India, 2010). Pada 1918, Mahatma Gandhi memulai *Khadi Movement* agar masyarakat mulai memproduksi dan menjual kain Khadi secara mandiri sebagai bagian penting dari *Swadeshi Movement* (Gandhian Institutions, 2018). Nilai yang ada di dalam *Khadi Movement* pun masih sama dengan *Swadeshi Movement*. Gandhi meminta setiap orang untuk menanam dan memanen bahan kain Khadi dan menenunnya secara mandiri (Supraja, 2020). Pekerjaan ini dapat menyelamatkan masyarakat miskin dan pengangguran karena hampir tidak membutuhkan modal dan mudah dipelajari sendiri (Gandhian Institutions, 2018). Orang-orang di seluruh negeri pun akhirnya melakukan seluruh perintah Gandhi demi membantu negara untuk menuju kemandirian ekonomi. Gandhi selalu menganjurkan pentingnya mengenakan kain Khadi. Baginya, yang penting bukanlah produknya, tetapi nilai yang terkandung dalam pembuatannya (Sukkha Citta, 2022).



Gambar 2.7 Potret Mahatma Gandhi yang sedang menenun kain *Khadi*
Sumber: Vino Supraja, 2020

Selama masa perjuangan kemerdekaan India, Gandhi menyadari bahwa penyelamatan ekonomi India terdiri dari mendorong dan menghidupkan kembali industri dalam negeri (Joseph, 2014). *Swadeshi* tidak hanya mencakup perlindungan terhadap industri lokal, sebagai nilai yang terbentuk secara organik dari ekonomi dan masyarakat yang terintegrasi dengan baik yang berakar pada nilai-nilai budaya asli (Hindu), termasuk pengekanan terhadap pola-pola konsumsi gaya Barat (Nayar, 2000).

2.3.2. Politisasi Swadeshi pada era pasca-Reformasi Ekonomi 1991

Tahun 1991 merupakan tahun di mana India melakukan restrukturisasi ekonomi setelah terjadinya krisis neraca pembayaran yang sangat parah. Proses restrukturisasi tersebut digerakkan oleh pemerintah dengan mengubah orientasi kegiatan perdagangan menjadi lebih terbuka terhadap kekuatan pasar internasional.

Peran pemerintah dalam ekonomi politik pun direstrukturisasi, serta pihak swasta diberikan keleluasaan (Ahluwalia, 2002). Namun, dalam model liberalisasi ekonomi India tersebut kurang memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pelayanan publik²¹. Sehingga dapat dikatakan, liberalisasi ekonomi 1991 dibentuk semata-mata hanya untuk membenahi ekonomi pemerintah daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sinha & Srivastava, 2017).

Sejak pasca kemerdekaan India, *Swadeshi* mengambil mode komando Sosialis khas Uni Soviet. Namun, *Swadeshi* dapat dikatakan melemah pada era ini. Dibuktikan dengan frekuensi kata “*Swadeshi*” pada publikasi berbahasa Inggris mencapai titik terendahnya pada tahun 1980 (Pai, 2021). Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, terdapat dua aktor utama yang berperan untuk mempertahankan nilai *Swadeshi*: Swadeshi Jagran Manch (SJM) dan Bharatiya Janata Party (BJP). Kontribusi kedua aktor tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Swadeshi Jagran Manch (SJM)

Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi ini, didirikan sebuah organisasi bernama Swadeshi Jagran Manch (SJM) pada 22 November 1991 (Anand, 2020). Pada 12 Januari 1992, SJM mengadakan kampanye besar pertamanya melawan kebijakan liberalisasi ekonomi pemerintah pusat. Isu yang diangkat dalam kampanye ini yaitu perubahan dalam kebijakan

²¹ Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi pemberantasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan baru, menghidupkan kembali pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Sementara aspek pembangunan pelayanan publik meliputi pendidikan, kesehatan, dan *upgrade* teknologi.

ekonomi, devaluasi rupee, dan campur tangan kekuatan eksternal dalam pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak kolektifnya yang merugikan. Kampanye ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan ideologi yang beragam untuk melawan imperialisme ekonomi. Untuk semakin memperkuat promosi visi SJM, literatur tentang *Swadeshi*, hak kekayaan intelektual, GATT, dan imperialisasi ekonomi perusahaan multinasional pun diterbitkan²² (Swadeshi Jagran Manch, 2008b).

Berdasarkan rincian lini masa agenda pergerakan SJM pada Tabel 2.7, dapat disimpulkan bahwa gerakan ini sangat ambisius dengan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mengamalkan nilai *Swadeshi* dan memberi edukasi akan dampak negatif dari liberalisasi. Seluruh kegiatan pergerakan yang dikerahkan selama satu dekade tersebut dapat dikatakan sukses dalam mencapai tujuan awal (Swadeshi Jagran Manch, 2008b).

Tabel 2.7 Lini masa Agenda Pergerakan SJM dalam Mempromosikan Nilai Swadeshi pada Dekade Pertama pasca-Restrukturisasi Ekonomi India 1991

Tahun	Agenda Pergerakan	Keterangan
22 November 1992	Pertemuan publik besar bersama SJM di Mumbai	Dihadiri oleh para pemikir terkemuka serta para pekerja dengan latar belakang ideologi yang beragam.
4-5 September 1993	Konvensi nasional pertama di New Delhi	Dihadiri oleh 622 delegasi, serta perwakilan dari BMS, ABVP, BKS, ABGP, dan organisasi lainnya.
15 November 1993	Pertemuan pekerja utama di Nagpur	Diputuskan untuk memboikot produk-produk perusahaan multinasional seperti <i>Pepsi</i> , <i>Coca Cola</i> , dan <i>Colgate</i> . Pemerintah

²² Literatur yang terkenal pada masa itu adalah “*The Menace of Multinationals*” oleh Shri Dayakhrisna, “*Hindu Economics*” oleh Dr. MG. Boakare, dan lain sebagainya.

			diminta untuk tidak menyetujui <i>Dunkel Draft</i> ²³ .
2-3 April 1994	Pertemuan pertama di <i>National Council</i> di Pune		Diputuskan untuk memulai kembali program kampanye massa yang menjadi pencapaian besar bagi SJM ²⁴ . Presiden India didesak untuk menghentikan pemerintah melanjutkan <i>Dunkel Draft</i> . Orang-orang bersumpah untuk menggunakan produk <i>Swadeshi</i> ²⁵ .
26 Mei 1995	Seminar masalah listrik di Mumbai		Dibentuk Kelompok Aksi Nasional tentang Listrik untuk melawan penyimpangan dalam kesepakatan dengan perusahaan multinasional.
Agustus 1995	Penerbitan majalah <i>Swadeshi Patrika</i> dimulai		Majalah <i>Swadeshi Patrika</i> diharapkan membantu gerakan dalam jangka panjang.
21 Oktober 1995	Pertemuan pertama dari Kelompok Aksi Nasional tentang Listrik		Mengadvokasikan isu pembangunan pembangkit listrik raksasa di Dabhol oleh <i>Enron Corp</i> yang sudah memiliki kesepakatan dengan Pemerintah Negara Bagian Maharashtra ²⁶ . Akhirnya pemerintah menarik kesepakatan tersebut.
4-5 November 1995	Konvensi nasional kedua SJM di Kalkuta		Dihadiri oleh 422 delegasi. Resolusi tentang “Invasi Budaya melalui Media” dan “Situasi Ekonomi Negara” disahkan dalam konvensi ini. Dibentuk kelompok aksi tentang kekuasaan, masalah penun, undang-undang Paten, keselamatan ternak dan penangkapan ikan di laut.
7 Januari 1996	Pertemuan pertama komite kampanye dalam rangka mendukung para pekerja <i>Beedi</i> ²⁷ di Pune		Jutaan pekerja <i>Beedi</i> terancam akibat keputusan pemerintah mengizinkan impor rokok mini dan mengurangi tarif masuknya.

²³*Dunkel Draft* adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Direktur Jenderal GATT, Arthur Dunkel, yang menjadi rancangan dasar pembentukan WTO di tahun 1995 (M., 1992).

²⁴ Dalam rentang waktu 15 hari, 183.401 pekerja dihimpun dari 5.418 kota dan 109.140 desa di seluruh negeri.

²⁵ Selama gerakan ini berlangsung, 372 Depot *Swadeshi* dibuka dan lebih dari 30 juta pamflet didistribusikan.

²⁶ Isu tersebut diadvokasikan karena masyarakat tidak diberitahu soal kesepakatan tersebut.

²⁷ Rokok tipis khas Asia Selatan yang dibungkus daun tendu dan diikat dengan benang di kedua ujungnya. Rokok ini sangat populer di kalangan orang miskin (Cherianane, 2014).

2 Januari dan 14 Januari 1996, keduanya berakhir pada 8 Februari 1996	<i>Jalyatra</i> (Pawai Perahu) dimulai dari Gujarat di pantai Barat dan dari Kakdwip di pantai Timur ²⁸	Bertujuan menentang keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan multinasional untuk menangkap ikan di laut dalam dari kedua wilayah pesisir dalam cakupan 7000 km.
7-8 April 1996	Seminar “ <i>Power Policy Contradiction and Swadeshi Perspective</i> ” di New Delhi	Diadakan oleh kelompok kerja tentang ketenagalistrikan yang dibentuk SJM. Banyak dihadiri oleh pakar dan teknisi dari sektor ketenagalistrikan.
5-6 Oktober 1996	Rapat <i>National Council</i> di Delhi	Laporan mengenai kegiatan yang telah dijalani dan pemaparan rencana program masa depan
14-16 November 1997	Konvensi Nasional SJM yang ketiga di Varanasi	Dihadiri oleh 960 delegasi, serta diresmikan oleh Mantan Direktur UNCTAD, Shri Bhagirath Lal Das. SJM meminta pemerintah untuk mengundurkan diri dari WTO ²⁹ .
18-19 April 1998	Pertemuan Rashtriya Sabha Manch di Raipur	Memperingatkan pemerintah terhadap impor gratis 380 barang berdasarkan kebijakan ekspor-impor.
3-9 Mei 1998	“ <i>Rashtriya Vichar Varga</i> ” di New Delhi	Diskusi tentang situasi ekonomi terkini di negara tersebut, tantangan yang ditimbulkan liberalisasi, WTO dan isu-isu terkait, konsep pembangunan, strategi <i>Swadeshi</i> , dan berbagai topik lainnya.
17 September – 10 Oktober 1998	“ <i>Swadeshi Chetna Yatra</i> ” di seluruh negeri	Memperingati tonggak penting kemajuan gerakan <i>Swadeshi</i> . Kegiatan ini bertujuan untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya eksternal dan mengajak mereka untuk menaruh minat yang konstruktif terhadap gerakan <i>Swadeshi</i> .
28-29 Oktober 1998	Pertemuan Komite Pengarah Pusat SJM di Mumbai	Disahkannya resolusi terhadap keputusan ekonomi kontroversial pemerintah pusat.

²⁸ Perjalanan melewati pesisir dari enam negara bagian dengan perahu pribadi nelayan dan peralatan seadanya.

²⁹ SJM memutuskan tiga inisiatif: 1) pembentukan kelompok studi di seluruh negeri; 2) Organisasi Sangarsha Vahini; dan 3) Konstitusi forum simpatisan untuk memberikan dukungan finansial kepada SJM.

25-30 Januari 1999	“Mela Swadeshi” di New Delhi	Diadakan oleh <i>Centre for Bharatiya Marketing Development</i> (CBMD) untuk mempromosikan produsen <i>Bharatiya</i> dan membangun wirausahawan <i>Swadeshi</i> . Kegiatan ini diresmikan oleh Atal Bihari Vajpayee, Perdana Menteri India dan lebih dari 300 pelaku bisnis turut berpartisipasi.
25 Februari 1999	Unjuk rasa besar-besaran di Ramlila Maidan, New Delhi	Menentang struktur WTO yang tidak demokratis

Sumber: olah data dari Swadeshi Jagran Manch, 2008b

SJM pun semakin berkembang seiring perkembangan zaman, hingga pada saat ini sudah bekerja sama dengan 15 organisasi dan asosiasi lain. SJM sudah memiliki jaringan subunit hingga tingkat distrik yang menjangkau seluruh wilayah di India, bahkan di beberapa distrik sudah ada yang mencapai tingkat blok agar mempermudah dalam mengadvokasikan suara dari lapisan masyarakat terbawah. Hingga saat ini, banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh SJM demi mempromosikan nilai *Swadeshi* seperti mempromosikan produk *Swadeshi*, mengatur bantuan dalam pengembangan profesional, struktur perusahaan India yang berorientasi pada nilai, hingga menerbitkan *Swadeshi Patrika* yang merupakan majalah bulanan dalam bahasa Hindi dan bahasa Inggris (Swadeshi Jagran Manch, 2008a).

2. Bharatiya Janata Party (BJP)

BJP didirikan oleh Jana Sangh atas persetujuan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang merupakan organisasi budaya nasionalis Hindu berbasis kader (Nayar, 2000). “Sosialisme Gandhi” merupakan

ideologi yang mendominasi di partai ini, yang mana berusaha merekonstruksi sistem sosial ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Visi nasionalis BJP menganut *Hinduvta* versi Golwakar yang menganggap seluruh agama adalah bagian dari Hindu sehingga terjadi ‘penerimaan’ bahwa Hindu merupakan identitas agama dan identitas nasional India. Sembari itu, BJP juga menganut sekularisme positif yang mengintegrasikan seluruh agama dalam kepentingan publik, yang mana ini merupakan dasar dari demokrasi. Dalam penerapan demokrasi, BJP juga mengacu pada humanisme integral yang membangun simbiosis antara masyarakat dan individu dalam menciptakan kebebasan yang organik dengan mengikuti esensi dari budaya India. Berangkat dari pemikiran tersebut, BJP bertekad untuk membantu seluruh kelompok masyarakat yang terbelakang untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, tetapi dengan tetap mempertahankan moralitas (Parshad, 2018).

Eksistensi Bharatiya Janata Party (BJP) juga meningkat akibat kebangkitannya di tahun 1990-an (Nayar, 2000). Kekalahannya di Pemilu Lok Sabha³⁰ 1991 tidak benar-benar menjadi kekalahan bagi BJP. Walaupun pada masa itu BJP tidak berhasil membentuk pemerintahan, BJP berhasil membangun citra baru yang kuat sebagai partai nasionalis murni, bahkan menjadi satu-satunya partai nasionalis yang berhasil meningkatkan persentase elektabilitasnya. Dalam pemilu Lok Sabha 1991, India National Congress (INC) memenangkan suara sebesar 244 dari 543 kursi, sedangkan

³⁰ Pemilu *Lok Sabha* bertujuan untuk memilih *House of the People* atau lembaga legislatif.

BJP menempati posisi kedua dengan memenangkan 120 kursi. Tanpa membentuk pemerintahan, BJP pada akhirnya menjadi oposisi terbesar dari INC (Austin & Lyon, 1993).

BJP membantah model pembangunan yang ditawarkan oleh INC, baik terhadap model sebelumnya dari Nehru yang menginvestasikan negara dengan kekuasaan atas ekonomi, maupun model terbaru di 1991 dari Narasimha Rao yang secara drastis mengalihkan penekanan dari negara ke pasar (Nayar, 2000). Sejak didirikan pada 1980, BJP berusaha untuk menjadi alternatif nasionalis yang lebih kredibel dari INC. BJP sempat mengajukan tiga kritik kepada INC. Pertama, BJP berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh INC dapat mengancam budaya India. Kedua, BJP menuduh INC meruntuhkan demokrasi India melalui kepemimpinan yang anti-demokrasi dan telah melakukan korupsi. Ketiga, BJP berargumen bahwa INC telah melecehkan ideologi sekularisme negara sebagai strategi untuk menarik suara kaum minoritas (Seshia, 1998).

Secara umum, BJP menolak komunisme dan kapitalisme, karena kedua ideologi tersebut berasal dari bangsa asing. Sebaliknya, partai ini secara terang-terangan menganut paham *Swadeshi*, yang dianggap sebagai “nasionalisme ekonomi” (Nayar, 2000). Dalam konvensi pertamanya, BJP mendeklarasikan “*Pancha Nishthas*” atau lima prinsip paduan yang akan memandu jalan politiknya: 1) komitmen terhadap nasionalisme dan integrasi nasional; 2) komitmen terhadap demokrasi; 3) komitmen terhadap

Sosialisme Gandhi³¹; 4) komitmen terhadap sekularisme positif atau “*sarva dharma sambhava*”; dan 5) komitmen terhadap politik berbasis nilai (Bharatiya Janata Party, 2010). Penekanan Sosialisme Gandhi dalam menyejahterakan pribumi sangat sesuai dengan tujuan BJP untuk membentuk citra sebagai pembela budaya Hindu yang terancam. Walaupun BJP merupakan salah satu partai pertama yang mendukung ekonomi neoklasik, partai ini menggunakan *Swadeshi* untuk mendefinisikan kebijakan dan retorika ekonominya ketika dampak-dampak negatif yang terkait dengan program liberalisasi ekonomi India mulai terasa pada tahun 1990-an. Langkah yang diambil BJP ini diperkirakan dapat memperoleh dukungan dan loyalitas dari industri India. Nasionalisme ekonomi Hindu seperti yang diwujudkan dalam *Swadeshi* memberikan identitas dan stabilitas yang didasarkan pada masyarakat pribumi yang meliberalisasi perubahan (Seshia, 1998).

Namun, sejak tahun 1996, BJP mengubah arah pergerakannya menjadi lebih terbuka kepada liberalisasi eksternal. Hal ini dikarenakan terdapat keanggotaan baru yang menyebabkan terbaginya anggota menjadi dua sayap: sayap pragmatis dan sayap ideologis³². Banyak kaum ideologis yang mengundurkan diri³³ sehingga membuat kaum pragmatis yang baru bergabung memanfaatkan popularitas BJP untuk melanjutkan liberalisasi.

³¹ Pendekatan Gandhi terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi yang mengarah pada pembentukan masyarakat *samara* yang bebas eksploitasi.

³² Sayap pragmatis merujuk kepada kalangan muda yang baru bergabung, mereka cenderung mencari keuntungan politik. Sementara sayap ideologis merujuk kepada anggota-anggota lama yang muncul dari RSS dan mempertahankan ide-ide nasionalisme budaya dan ekonomi.

³³ Alasan mereka mengundurkan diri tidak ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Mereka harus diberikan kontrol yang kuat jika ingin memerintah, sehingga Atal Behari Vajpayee dipilih sebagai Perdana Menteri (Arulanantham, 2004). Vajpayee mengalami kesulitan pada saat menyeimbangkan kepentingan para pejabat pemerintahan yang pragmatis dan *Sangh Parivar* atau keluarga organisasi nasionalis Hindu yang ideologis (Pai, 2021). Pada akhirnya, kaum pragmatis berhasil menunjukkan bahwa nasionalisme dan globalisasi tidak selalu merupakan kekuatan yang berlawanan, terkadang keduanya dapat saling memperkuat. Nasionalisme dapat menciptakan gerakan-gerakan yang memunculkan globalisasi, kemudian pada gilirannya akan memberi umpan balik untuk menciptakan identitas nasional yang lebih kuat (Arulanantham, 2004).

Walaupun *Swadeshi* bukan merupakan falsafah negara India, tetapi fungsinya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik dan spiritual. Dengan mengedepankan kemandirian dan pelayanan kepada sesama, *Swadeshi* telah menjadi pilar penting dalam perjuangan kemerdekaan India serta dalam pembentukan identitas nasional yang kuat. Filosofi ini tetap relevan hingga saat ini sebagai panduan untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial di masyarakat (Gandhi Sevagram Ashram, 2017).

Reformasi yang terjadi di India pada tahun 1991 memiliki dampak yang sangat besar, terutama terhadap arah kebijakan ekonomi. *Swadeshi* yang sudah diperjuangkan selama puluhan tahun pun dapat dikatakan meredup. Namun, *Swadeshi* tidak sepenuhnya hilang di masyarakat, tetapi hanya mengalami sedikit adaptasi dan berusaha menyeimbangkan perannya dengan globalisasi.

Arulanantham (2004) pun berargumen bahwa *Swadeshi* dan globalisasi dapat berdampingan dan saling memperkuat satu sama lain, bahkan globalisasi pun dapat memperkuat identitas nasional di India. Sintesis dari ide-ide Gandhi dengan ide-ide dunia modern dinilai akan menciptakan masyarakat yang lebih holistik dan terintegrasi (Ravichandran, 2015).